

ABSTRAK

Keterbatasan ekonomi masyarakat Kampung Nelayan Tambak Mulyo, Semarang menyebabkan kecenderungan untuk mengabaikan mutu lingkungan, sehingga lingkungan permukiman menjadi kumuh. Lingkungan yang kumuh ini menandakan telah terjadi suatu pengabaian hak atas lingkungan yang sehat. Melalui Target 11 *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu “Mencapai Peningkatan yang Signifikan dalam Kehidupan Penduduk Miskin di Permukiman Kumuh (Minimal 100 Juta) pada Tahun 2020”, pemerintah berusaha keras mewujudkan permukiman yang layak huni. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi MDGs dalam rangka memenuhi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Hak atas Lingkungan bagi masyarakat Kampung Nelayan Tambak Mulyo dan apa saja hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerapan MDGs, serta bagaimana implikasi MDGs dalam rangka memenuhi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Hak atas Lingkungan bagi masyarakat Kampung Nelayan Tambak Mulyo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal ini bersifat kualitatif, karena lebih ditekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data. Menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ini diupayakan untuk memahami fenomena-fenomena di lapangan kemudian ditafsirkan dan dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, melalui Target 11 Program MDGs Pemerintah bukan hanya melakukan perbaikan dan penataan terhadap permukiman saja, melainkan juga melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, karena hak atas lingkungan tidak dapat dipenuhi tanpa disertai peningkatan taraf perekonomian. Hambatan-hambatan kerap kali mengakibatkan kebijakan menjadi kurang atau tidak dapat dilaksanakan secara baik, sehingga ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Hak atas Lingkungan. Jika target 11 terpenuhi pada 2020, maka akan serta merta diikuti dengan kesuksesan Indonesia dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, karena negara bukan hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga fungsi kesejahteraan bagi setiap warga negara. Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan, karena masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan di permukiman tersebut.

Kata Kunci : *Millennium Development Goals*, Hak atas Lingkungan, Kampung Nelayan Tambak Mulyo